



NOMENKLATUR RKB MASIH MENGAMBANG

Akses Pendidikan Pra Sejahtera Harus Terjamin

YOGYA (KR) - Wacana meleburkan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait kuota ke sekolah negeri perlu dipertimbangkan secara matang. Hal ini karena jumlah DTKS di Kota Yogya jauh lebih besar dibanding KMS. Sementara akses pendidikan bagi keluarga pra sejahtera harus terjamin.

Anggota DPRD Kota Yogya Ahmad Mufaris, mengungkapkan begitu menerima informasi rencana penghapusan kuota KMS untuk dialihkan DTKS dirinya langsung konfirmasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya.

"Harus dipertimbangkan betul dasar dan tujuannya. Jangan sampai justru nanti menimbulkan persoalan," ungkapnya.

Menurut anggota Komisi D ini, KMS merupakan data faktual yang diperbarui setiap tahun. Parameternya pun disesuaikan dengan kondisi di daerah. Berbeda dengan DTKS yang merujuk ketentuan Kementerian Sosial atau skala nasional. Apalagi ada beberapa pemegang KMS yang belum masuk dalam DTKS.

Oleh karena itu kebijakan afirmatif Pemkot Yogya untuk keluarga pra sejahtera dalam akses pendidikan harus dipertegas. Jika memang dituntut me-

Ahmad Mufaris



KR-Istimewa

nyesuaikan DTKS, tetap harus ada kebijakan lokal yang mengakomodir keluarga pra sejahtera yang belum masuk DTKS.

"Pendidikan itu kan hak setiap warga. Sehingga bagaimanapun juga perlu ada kebijakan afirmatif. Terutama kuota yang diberikan bagi warga pra sejahtera betul-betul sesuai kondisi riil," tandasnya.

Di samping itu, politisi dari Partai Demokrat ini juga menyoroti nomenklatur Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) yang masih mengambang. Idealnya RKB masuk dalam bidang pelestarian budaya namun hingga saat ini justru belum terakomodir. Akibatnya, kegiatan seni dan budaya yang diampu oleh kelompok masyarakat di wilayah rentan belum bisa dimaksimalkan.

"Kepala daerah seharusnya mengambil tindakan dalam hal tata organisasi. Apalagi semua kelurahan nantinya diarahkan menjadi RKB. Tapi jangan sampai nomenklturnya seakan digantung," katanya.

Dari 45 kelurahan di Kota Yogya, baru dua kelurahan yang sudah ditetapkan DIY sebagai kelurahan budaya yakni Terban dan Kricak. Kemudian terdapat 22 kelurahan yang masuk akreditasi RKB. Sedangkan sisanya yakni 21 kelurahan masih butuh pembinaan.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005